

KOMPOL NYI AYU FITRIA FACHA SH MH

Jabat Kasat Lantas Polresta Magelang

MAGELANG (KR) - Acara serah terima beberapa jabatan di lingkungan Polresta Magelang dilaksanakan di halaman Polresta Magelang dipimpin Kapolresta Magelang Kombes Pol Mustofa SIK MH, Jumat (9/8). Diantara yang dilantik dan diambil sumpahnya dalam acara ini adalah Kompol Nyi Ayu Fitria Facha SH MH, pemeran tokoh 'Yu Es Teh' yang bermain bersama Pak Bhabin dalam 'Polisi Motret'.

Kompol Nyi Ayu Fitria Facha SH MH dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kasat Lantas Polresta Magelang menggantikan Kompol Agus Santoso SE SIK MH. Kompol Agus Santoso selanjutnya menduduki jabatan barunya sebagai Waka Polres Pema-

lang, sedang Kompol Nyi Ayu Fitria Facha sebelumnya menjabat Kasubbag Renmin Ditlantas Polda Jateng.

Jabatan Kasat Reskrim Polresta Magelang juga diserahterimakan dari Kompol Rifeld Constantien Baba SIK MH kepada Kompol M Fachrurrazi SH SIK MH. Kompol Rifeld menduduki jabatan baru sebagai Kanit 3 Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Jateng, sedang Kompol M Fachrurrazi sebelumnya sebagai Kanit 3 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jateng.

MEMPEROLEH PERHATIAN DPRD KOTA MAGELANG

Tingkat Kebocoran PDAM Melebihi Rata-rata

MAGELANG (KR) - Tingkat kebocoran dari PDAM Kota Magelang yang sangat tinggi, memperoleh perhatian di forum rapat paripurna DPRD Kota Magelang, Rabu (8/8) lalu. Di forum rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Bustanul Arifin juga menyinggung keberadaan beberapa aset.

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kota Magelang membahas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Kota Magelang Tahun Anggaran 2025, yang dibacakan salah satu anggota Waluyo, mengatakan tingkat kebocoran dari PDAM Kota Magelang sangat tinggi melebihi rata-rata nasional, sehingga membuat

pendapatan tidak maksimal. Pelayanan pun dinilai masih sangat buruk, banyak keluhan dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat.

Seperti air yang sering mati, terutama di wilayah Magelang Selatan. Air tidak mengalir, tetapi pembayaran tetap sama. Tidak adanya kompensasi dari pelayanan yang kurang maksimal dari PDAM Kota Magelang. Di forum yang dihadiri Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD dan Wakil Walikota Magelang HM Mansyur Mag serta para anggota DPRD Kota Magelang juga disampaikan DPRD Kota Magelang berharap agar di tahun-tahun selanjutnya PR-PR tahun ini segera terselesaikan.

AKP Achirul Yahya sebelumnya menjabat Kasat Res Narkoba Polres Purbalingga.

Kepada wartawan usai memimpin acara serah terima jabatan, Kapolresta Magelang, yang didampingi Wakapolresta Magelang AKBP Imam Safii SIK MH, diantaranya mengatakan para pejabat yang baru ini diminta untuk

bersama-sama langsung bekerja, tidak ada istilah menyesuaikan. Karena banyak 'PR' yang harus diselesaikan, khususnya menjelang pelaksanaan Operasi Mantap Praja dan upaya menjaga dan memelihara keamanan dan tertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah Kabupaten Magelang.

(Tha)-f



KR-Thoha

Kompol Nyi Ayu Fitria Facha SH MH menandatangani berita acara pelantikan dan serah terima jabatan dan pakta integritas, disaksikan Kapolresta Magelang.

LATKATPUAN HUMAS POLDA JATENG Membina Komunikasi Harmonis dengan Publik



KR-Karyono

Suasana latihan peningkatan kemampuan (Latkatpuan) personel Humas jajaran Polda Jateng.

SEMARANG (KR) - Pemilukada secara serentak semakin dekat. Polda Jateng bersama jajaran telah melakukan berbagai persiapan. Khusus bidang hubungan masyarakat (humas) melakukan persiapan dengan menggelar pelatihan bagi personel bertajuk 'Latihan Peningkatan Kemampuan (Latkatpuan)', Kamis (8/8) di Ball Room Hotel Muria Semarang.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menyadari menjelang Pemilukada 2024, peran humas menjadi semakin penting. Ini bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun rasa aman dan tenang di tengah masyarakat.

"Kita ingin masyarakat merasa terlindungi dan terinformasi dengan baik, apalagi di tahun politik seperti ini," tuturnya.

Kombes Pol Artanto menekankan pentingnya peran humas sebagai jembatan antara Polri dan masyarakat. Ia berharap agar personel humas di seluruh jajaran Polda Jateng dapat menjalin hubungan erat dengan media dan para influencer, menciptakan kolaborasi yang membawa manfaat positif bagi masyarakat.

Selama pelatihan, personil Humas tidak hanya dibekali keterampilan jurnalistik, tetapi juga diajarkan cara menggunakan teknologi modern yang dapat membantu mereka menyampaikan informasi dengan lebih cepat dan tepat. "Kita ingin Humas menjadi bagian dari solusi, menjadi penyejuk di tengah hiruk-pikuk tahun politik ini," lanjut Artanto.

Kabidhumas juga berharap bahwa Latkatpuan ini bisa menjadikan humas sebagai "Cooling system" yang efektif selama Pemilukada 2024. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang benar, tetapi juga merasa tenang dan aman di tengah berbagai dinamika yang terjadi.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga suasana yang damai dan harmonis," ucapnya penuh harap. Melalui pelatihan ini, Polda Jateng menunjukkan kesungguhannya dalam melayani masyarakat dengan lebih baik.

Dengan mengedepankan komunikasi yang humanis dan inklusif, Polri berusaha memastikan bahwa setiap warga merasa didengar dan dilindungi. Bersamaan, kita bisa menghadapi Pemilukada 2024 dengan optimisme dan keyakinan bahwa keamanan dan ketertiban akan selalu terjaga.

(Cry)-f

LPK MUA YPP Teckno Park Dilaunching

WONOGIRI (KR) - Yayasan Pendidikan Pancasila (YPP) Teckno Park menyiapkan tenaga skill mumpuni guna menghadapi perkembangan zaman. Dengan melibatkan lembaga keterampilan serta ahli kecantikan profesional YPP Teckno Park Wonogiri, Kamis (8/8) siang, melaunching LPK MUA (Make Up Artis) di SMK Pancasila 5 Wonogiri.

Diungkapkan Pembina YPP Surakarta Prof Soeprayitno MBA MM, masyarakat modern dituntut memiliki keterampilan khusus di segala bidang usaha, termasuk bidang tata rias dan tata busana. "Agar tampil menarik seseorang utamanya wanita sekarang harus memiliki esensi dan sensasi," katanya saat acara peluncuran (launching) LPK MUA YPP Teckno Park di aula SMK PS 5 Wonogiri.

Keberadaan LPK MUA, ujar Soeprayitno, untuk membantu kalangan angkatan kerja alumni sekolah atas yang berada di bawah YPP Surakarta sehingga begitu lulus sekolah bisa mandiri dengan skill sebagai perias. "Di Cabang Wonogiri (YPP) sendiri ada 12 sekolah, untuk tahap awal ini kursus ketrampilan untuk guru dan peserta didik. Tapi ke depan kita juga siap melayani peserta dari umum," tandasnya.

Ketua YPP Cabang Wonogiri, Warno Hadi, menyambut baik berdirinya LPK MUA YPP Teckno Park. Jurusan yang diluruskan yakni make up artis maupun tata rias dinilai sangat cocok karena banyak peminatnya.

"Saat ini tata rias atau perawatan kecantikan sudah menjadi kebutuhan warga khususnya kaum perempuan," kata Warno sembari menambahkan pada bulan-bulan ramai orang hajatan pasti mereka ingin tampil menarik dengan pergi ke salon kecantikan atau pemanggil perias ke rumahnya.

Menurut Warno Hadi, biaya pelatihan atau kursus tata rias di LPK MUA sengaja dipasang ekonomis jika dibandingkan dengan LPK sejenis lainnya. "Jika (kursus) di LPK umum rata-rata untuk kelas mahir itu Rp 3,5 sampai Rp 4 juta, tapi di LPK MUA hanya sekitar Rp 1,5 juta," papar Warno Hadi.

(Dsh/Qom)-f



KR-Djoko Santoso HP

Praktik merias wajah oleh instruktur LPK MUA YPP Teckno Park disaksikan Prof Soeprayitno MBA MM dan Ketua YPP Cabang Wonogiri.



KR-Budiono

Sekda Jateng Sumarno (berjenggot) membuka Sosialisasi Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi.

SEMARANG (KR) - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah (Jateng) Sumarno mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan sosialisasi antikorupsi kepada para pelaku usaha. Pemprov menilai pelaku usaha rentan terhadap praktik gratifikasi, sehingga harus mendapatkan perhatian serius.

Sumarno mengatakan hal ini saat membuka Sosia-

lisasi antikorupsi dan pencegahan korupsi bagi pelaku usaha di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jateng, di Semarang Kamis (8/8). Pemprov Jateng mencoba memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha agar turut menciptakan iklim usaha yang bebas korupsi.

Menurut Sumarno, memberi sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)

karena berhubungan dengan pekerjaan adalah bentuk gratifikasi atau suap. Apalagi, jika ada permintaan sesuatu dari ASN kepada pelaku usaha, maka sudah masuk tindak pemerasan. Termasuk memberi parcel atau hadiah kepada ASN juga merupakan bentuk gratifikasi. "Mudah-mudahan dari sosialisasi ini para pelaku usaha menjadi paham tentang gratifikasi, sehingga tidak ada upaya dari pelaku usaha untuk mem-

beri sesuatu kepada ASN di Pemprov Jateng," tegas Sumarno.

Menurut Sumarno organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai kewenangan perizinan dan pengawasan punya potensi terhadap praktik gratifikasi. Termasuk para pelaku usaha juga punya potensi melakukan praktik gratifikasi, khususnya saat mengajukan izin usaha atau saat mengikuti proyek pemerintah.

Pelaksana Tugas Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng, Sakina Rosellarsari menjelaskan, para pelaku usaha merupakan stakeholder yang dilayani oleh OPD yang dipimpinnya. Untuk itu, sosialisasi antikorupsi penting untuk dilakukan. Hingga kini jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai 916.996 unit, industri kecil 912.421 unit, sedangkan industri menengah besar sebanyak 4.575 unit.

(Bdi)-f



Jateng Tertarik Sistem Pembayaran Non Tunai BRT Trans Batam

KOMISI D DPRD Jawa Tengah tertarik dengan pengembangan bisnis yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, terkait dengan layanan non tunai menggunakan kartu uang elektronik pada bus rapid transit (BRT) Trans Batam. Sejak Januari 2023 Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) UPT Pelayanan Jasa Transportasi (PJT) Dishub Batam sudah 100 persen menggunakan sistem non tunai (cashless). Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi D Arifin Mustofa kepada wartawan di Semarang Kamis (1/8).

Kunjungan kerja Komisi D DPRD Jateng ke Batam, Kepulauan Riau, dilakukan Rabu (24/7). Di Batam, Komisi D yang didampingi Plh Kadisubsub Jateng rry Derima Riyanto, diterima langsung oleh Kepala Dishub Batam Salim SSos didampingi Kepala UPT PJT Bambang Sucipto.

Komisi D ingin mengetahui konsep apa saja yang sudah dilakukan Dishub Batam termasuk UPT PJT dalam membangun sistem pengoperasian non tunai. Komisi D menilai, konsep sistem pengoperasian non tunai bisa dimasukkan dalam draf dokumen Raperda Penyelenggaraan Perhubungan. Salah satu isu dalam rancangan peraturan itu adalah membangun sistem transportasi massal yang berkelanjutan. Penerapan sistem



KR-Budiono

Arifin Mustofa

Bahkan sistem cashless di Batam sudah dirintis sejak 2018.

Saat itu sempat gagal, dan dilakukan evaluasi. Ternyata masyarakat kesulitan untuk top up dana karena keterbatasan akses terkait dengan perbankan sebagai penyedia kartu uang elektronik. Pada 2020, BI melalui Qris meminta kepada bank pemerintah BRI, BNI, Mandiri, termasuk BCA untuk mengencarkan pelayanan non tunai. Pada 2021 sistem dibangun dan pemerintah menyusun peraturan wali kota dalam mengatur tarif. Akhirnya 1 Januari 2023 sudah mulai dilaksanakan sistem non tunai. Kebijakan itu juga sebagai pendukung Kota Batam sebagai kota digitalisasi.

(Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Arifin Mustofa kepada wartawan KR Biro Semarang Budiono Isman-Anf)